

LAPORAN TAHUNAN

PENELITIAN HIBAH BERSAING



ANALISIS *GENDER RESPONSIVE* DALAM PROGRAM *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+)* DI PROVINSI ACEH

Tahun Pertama dari Rencana 2 (dua) Tahun

Peneliti


Nursiti, S.H., M.Hum. NIDN. 0015107203
Dr. Muazzin, S.H., M.H. NIDN. 0008027001
Ria Fitri, S.H., M.Hum. NIDN. 0021016601

Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian
Nomor: 129/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016


UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOVEMBER 2016

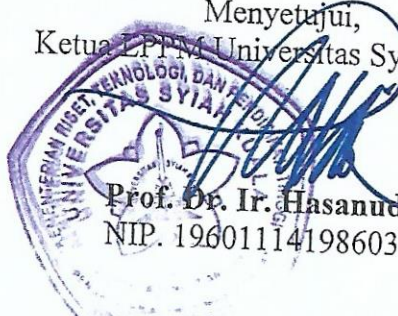
HALAMAN PENGESAHAN

Judul	: Analisis <i>Gender Responsive</i> dalam Program <i>Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)</i> di Provinsi Aceh.
Ketua Peneliti	
Nama Lengkap	: Nursiti, S.H., M.Hum.
NIDN	: 0015107203
Jabatan Fungsional	: Lektor
Program Studi	: Ilmu Hukum
Nomor HP	: 08126901493
Alamat surel (e-mail)	: nursiti_amin@yahoo.co.id
Anggota (1)	
Nama Lengkap	: Dr. Muazzin, S.H., M.H.
NIDN	: 0008027001
Perguruan Tinggi	: Universitas Syiah Kuala
Anggota (2)	
Nama Lengkap	: Ria Fitri, S.H., M.Hum.
NIDN	: 0021016601
Perguruan Tinggi	: Universitas Syiah Kuala
Perguruan Tinggi	: Universitas Syiah Kuala
Institusi Mitra (jika ada)	: -
Nama Institusi Mitra	: -
Alamat	: -
Penanggung Jawab	: -
Tahun Pelaksanaan	: Tahun Pertama dari Rencana 2 (dua) Tahun
Biaya Tahun Berjalan	: Rp. 50.000.000,-
Biaya Keseluruhan	: Rp. 146.981.000,-

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Syiah Kuala

 Prof. Dr. Faisal A. Rani, S.H., M.Hum.
 NIP. 197210152003122003

Banda Aceh, 28 Nopember 2016

Ketua,

 Nursiti, S.H., M.Hum.
 NIP. 197210152003122003

Menyetujui,
 Ketua LPTM Universitas Syiah Kuala

 Prof. Dr. Ir. Hasanuddin, M.S.
 NIP. 196011141986031001

RINGKASAN

ANALISIS *GENDER RESPONSIVE* DALAM PROGRAM *REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION* (REDD+) DI PROVINSI ACEH

(Nursiti, Muazzin, Ria Fitri, 2016, 51 halaman)

Cancun Agreement merupakan hasil *Conference of Parties* (COPs) 16 UNFCCC di Cancun Meksiko, menjadi dasar hukum utama dari tanggung jawab Negara terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dalam perencanaan dan implementasi proyek *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Paragraph 72 *Cancun Agreement* menyatakan “agar Negara berkembang ketika mengembangkan dan menerapkan rencana strategi nasional untuk mengatasi, antara lain penyebab deforestasi dan degradasi hutan, isu kepemilikan lahan, masalah tata kelola hutan, *pertimbangan gender* dan *safeguards*, Negara berkembang harus memastikan adanya partisipasi secara penuh dan efektif dari seluruh pemangku kepentingan, secara khusus masyarakat adat dan komunitas lokal”. Pernyataan ini merupakan salah satu referensi penting berkaitan dengan integrasi *gender* dalam desain kebijakan dan pelaksanaan program REDD+, dimana dinyatakan bahwa *pertimbangan gender* sangat penting untuk memastikan kesetaraan dan partisipasi yang efektif.

Namun, proyek REDD+ dapat menjadi ancaman bagi perempuan yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan hutan, karena di kawasan hutan sebagian besar ditandai dengan ketidakjelasan hak masyarakat adat (termasuk perempuan) atas tanah dan sebagian tanah yang dipergunakan masyarakat masuk dalam kawasan hutan. Keadaan semakin diperparah dengan minimnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses manfaat dari inisiatif yang berkaitan dengan hutan. Hal ini akan berdampak negatif bagi banyak perempuan yang menggantungkan mata pencaharian dan kebutuhan hidupnya kepada hutan, yaitu akan kehilangan akses atas kawasan hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan kelembagaan yang ada pada tingkat Negara dan daerah terkait dengan *gender equality* dan *gender mainstreaming*, khususnya dalam sektor pengelolaan kehutanan serta mengidentifikasi dan menganalisis terhadap peluang dan tantangan untuk mengintegrasikan perspektif *gender* dalam perencanaan dan implementasi (SRAP) REDD+ Provinsi Aceh. Penelitian ini juga mengembangkan sebuah model integrasi perspektif *gender* dalam perencanaan dan implementasi proyek REDD+ Provinsi Aceh.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*, dengan melakukan kajian dan analisis atas data sekunder yang merupakan bahan kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap bahan-bahan kepustakaan hukum, baik ketentuan perundang-undangan, kaedah hukum dan kebijakan-kebijakan maupun pandangan-pandangan serta hasil penelitian yang terdahulu. Selain data kepustakaan sebagai sumber data utama, juga dilakukan pengumpulan data

lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan narasumber dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), dan *Focus Group Discussion* (FGD). Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan tantangan utama yang dihadapi kerangka hukum REDD+ Nasional terletak pada persoalan kejelasan penguasaan atas lahan dan kawasan hutan (*land tenurial*). Hak penguasaan atas lahan, hutan dan karbon yang jelas merupakan elemen yang penting bagi keberhasilan strategi REDD+. Memperjelas dan memperkuat penguasaan lahan dengan sendirinya dapat memberikan kontribusi bagi penurunan deforestasi dan degradasi hutan. Disamping itu memperjelas penguasaan lahan dan menjamin hak Masyarakat Hukum Adat (termasuk kelompok perempuan), juga meningkatkan kelangsungan kebijakan REDD+ dan menjamin kesetaraan, keefektifan dan efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah Strategi Nasional REDD+ yang dapat mengatasi persoalan-persoalan ini.

Strategi Nasional REDD+ dan SRAP REDD+ Aceh dengan jelas memuat referensi di dalam banyak ketentuannya mengenai pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat (harus dimaknai bahwa perempuan termasuk dalam kelompok ini) dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan REDD+. Namun, sebagai sebuah Strategi Nasional REDD+ belum memuat kriteria dan indikator yang lebih terperinci dari masing-masing prinsip *safeguards*, sehingga akan menyulitkan dalam melakukan pengukuran dalam implementasinya. Sebagai sebuah SRAP REDD+ pada tingkat lokal, seharusnya SRAP REDD+ Aceh tidak mengulangi kelemahan dalam Strategi Nasional REDD+. SRAP REDD+ seharusnya sudah memuat kriteria dan indikator yang lebih terperinci dari masing-masing prinsip *safeguards*, sehingga akan memudahkan dalam melakukan pengukuran dalam implementasinya.

SRAP REDD+ Aceh akan efektif apabila dapat diintegrasikan ke dalam proses perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan serta pembangunan mekanisme penerapan REDD+. Selain itu, dukungan pembiayaan juga merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan REDD+. Untuk mengawal pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi REDD+ berjalan dengan baik, perlu disusun kerangka kerja monitoring dan evaluasi sebagai pedoman monitoring dan evaluasi SRAP REDD+ Aceh.

(Dibiayai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian Nomor: 129/SP2H/LT/DRPM/III/2016, tanggal 10 Maret 2016)

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan rahmatNya serta selawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad atas segala petunjuknya sehingga penelitian dan penulisan Laporan Hasil Penelitian yang berjudul “Analisis Gender Responsive dalam Program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) di Provinsi Aceh.” dapat diselesaikan.

Penelitian ini dapat terlaksana atas bantuan dan kerjasama berbagai pihak karena itu perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah membiayai penelitian ini;
2. Ketua Lembaga Penelitian beserta seluruh karyawan yang telah membantu memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini;
3. Narasumber pada Task Force REDD+ Aceh di Kantor Bappeda Aceh, Kantor DPR Provinsi Aceh, Biro Hukum Sekretariat Pemerintah Daerah Provinsi Aceh, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Aceh, Kantor Dinas Kehutanan Kota Subulussalam, USAID Lestari Tapaktuan Aceh Selatan, dan KFW Jerman Subulussalam yang telah memberikan informasi dan data untuk kepentingan penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan kemajuan penelitian ini telah diupayakan sebaik mungkin, tetapi keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dapat menyebabkan kekurangsempurnaan hasil yang diharapkan. Oleh karena itu kritik dan saran untuk perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini.

Banda Aceh, 28 Nopember 2016

Peneliti,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
BAB IV METODE PENELITIAN	17
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	46
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	
1. Curriculum Vitae	
2. Instrumen Penelitian	
3. Draf Artikel Ilmiah	

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abidah Billah Setyowati, 2011, *How Bringing Gender Perspectives into REDD+ Policies Could Enhance Effectiveness and Empowerment*, Bangkok: WOCAN.
- Agus Purnomo, 2012, *Menjaga Hutan Kita Pro-Kontra Kebijakan Moratorium Hutan dan Gambut*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Angelsen, A. Brockhaus, M., Kanninen, M., Sills, E., Sunderlin, W. D. dan Wertz-Kanounnikoff, S. (eds.), 2009, *Realising REDD+: National strategy and policy options*, CIFOR, Bogor: Indonesia.
- Asian Development Bank (ADB), 2006, *Indonesia Country Gender Assessment*. Dikutip pada September 16, 2012 dari <http://www.adb.org/documents/indonesia-country-gender-assessment>
- Bernadinus Steni, 2010, *Perubahan Iklim, REDD dan Perdebatan Hak: Dari Bali sampai Copenhagen*, Bogor: Perkumpulan HuMa.
- Boer Mauna, 2000, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni.
- Bradley, A., A. Setyowati, J. Gurung, Y. Donald, C. Nett, S. Khiev, and J. Brewster, 2012. *Gender and REDD+: An Assessment in the Oddar Meanchey Community Forestry and REDD+ Site, Cambodia*. Washington DC: PACT.
- CIFOR, 2010, *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang hutan, perubahan iklim dan REDD*, Bogor: CIFOR.
- Gurung, J., Quesada, A., 2009, *Gender-Differentiated Impacts of REDD to be addressed in REDD Social Standards*. CARE International and Climate Community and Biodiversity Alliance.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 1996, *Agenda 21 Indonesia Strategi Nasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, Publikasi Awal, Bab 13 tentang Pengelolaan Kehutanan, Jakarta: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup.